

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan strategis untuk membangun sistem pertahanan yang mampu menjaga integritas wilayahnya yang luas dan tersebar. Dalam konteks tersebut, kekuatan udara memegang peranan penting karena karakteristiknya yang cepat, fleksibel, dan mampu menjangkau wilayah yang tidak dapat dicapai oleh matra lain. Perkembangan kekuatan udara Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis militer, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik luar negeri, perubahan arah kebijakan nasional, serta perkembangan lingkungan strategis global, yang terus berubah dari waktu ke waktu. Setiap perubahan pemerintahan membawa orientasi geopolitik yang berbeda, yang pada akhirnya menentukan arah modernisasi dan sumber pengadaan alutsista udara. Dengan demikian, penelitian mengenai kekuatan udara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan timbal balik antara kebutuhan pertahanan dan konfigurasi politik internasional pada tiap periode sejarahnya.

Penguatan pertahanan udara Indonesia di dua pemerintahan Soekarno dan Soeharto berbeda, karena memiliki pandangan politik dan situasi global yang berbeda. Pada masa Presiden Soekarno, konsep geopolitik yang menekankan pada kemandirian dan posisi strategis Indonesia sebagai poros kekuatan dunia menyebabkan kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) berada pada masa keemasan. Indonesia bahkan dikategorikan sebagai salah satu kekuatan militer udara terkuat di belahan bumi selatan, dengan pengadaan alutsista modern dari Uni Soviet seperti pesawat MiG-15, MiG-17, MiG-19, dan MiG-21 yang memperkuat postur pertahanan udara nasional. Pada periode ini, kekuatan pertahanan Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara dan menjadi salah satu yang paling disegani di dunia.¹

Pesawat tempur merupakan pesawat militer yang dirancang khusus untuk merebut, menguasai, dan mempertahankan wilayah udara suatu negara dengan cara menghancurkan atau melumpuhkan pertahanan udara musuh. Tidak seperti pesawat

¹ Hasto Kristiyanto, *Geopolitik Bung Karno Progressive Geopolitical Coexistence*. (Bogor: UNHAN RI PRESS, 2023), p. 281.

militer lainnya seperti pesawat pengebom atau pesawat angkut, pesawat tempur memiliki karakteristik berupa kecepatan tinggi, kelincahan manuver, serta dipersenjatai dengan sistem persenjataan modern seperti meriam otomatis, rudal udara-ke-udara, rudal udara-ke-darat, dan radar tempur.² Selain itu, dalam perkembangan teknologi mutakhir, pesawat tempur dilengkapi dengan sistem komputerisasi canggih yang meningkatkan efektivitas tempur, akurasi sensor, serta kesadaran situasional pilot. Namun kemajuan ini menuntut dukungan logistik dan teknologi yang sebagian besar dikuasai oleh negara-negara maju, sehingga membuka potensi ketergantungan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masalah inilah yang menjadi fokus penelitian, yakni bagaimana Indonesia pada masa Orde Baru mengelola pengadaan pesawat tempur di tengah dinamika geopolitik sekaligus menghadapi konsekuensi ketergantungan terhadap negara pemasok.

Penelitian mengenai kebijakan pengadaan pesawat tempur menjadi penting karena sektor udara memiliki karakteristik berbeda dibandingkan matra lainnya. Kekuatan udara bersifat cepat, fleksibel, dan memiliki jangkauan luas, menjadikannya komponen penting dalam sistem pertahanan modern. Penguasaan pesawat tempur juga berarti penguasaan teknologi tinggi yang menuntut kesiapan sektor-sektor pendukung lainnya. Fokus pada AURI dan pengadaan pesawat tempur mencerminkan peran strategis AURI dalam menjaga wilayah udara nasional, sekaligus menggambarkan modernisasi pertahanan sebagai simbol kemajuan teknologi militer Indonesia pada masa Orde Baru. Selain itu, sejarah perkembangan kekuatan udara Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, dari ketergantungan pada Uni Soviet pada masa Orde Lama hingga pergeseran orientasi ke negara-negara barat pada masa Orde Baru.

Pada konteks Indonesia, kekuatan udara semakin penting, terutama dalam melindungi integritas wilayah nasional yang luas dan besar. Dengan demikian, pemilihan dan akuisisi pesawat tempur telah muncul sebagai faktor yang sangat penting dalam pembentukan sistem pertahanan nasional yang kuat. Kebijakan pengadaan pesawat tempur di era Orde Baru dikonsentrasikan untuk memperkuat angkatan udara dengan membeli peralatan militer dari negara-negara Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memiliki pesawat tempur yang mampu bersaing

² Dwiyanto. dkk, *Kamus Istilah Strategi Pertahanan Udara*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024), p. 94.

dalam hal kecepatan, jangkauan, persenjataan, dan kemampuan bermanuver sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman militer yang datang dari luar maupun dalam negeri.

Namun, setelah peralihan kekuasaan kepada presiden Soeharto, orientasi politik luar negeri yang beralih ke Blok Barat disertai dengan merosotnya hubungan diplomatik dengan Uni Soviet menyebabkan terjadinya penurunan signifikan dalam kekuatan udara Indonesia. Embargo suku cadang dan pengurangan investasi pertahanan membuat AURI mengalami masa stagnasi dalam modernisasi alutsista, termasuk pesawat tempur, pada dekade 1970-1992. Dinamika tersebut menjadi cerminan dari perubahan arah kebijakan pertahanan nasional yang tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis militer, tetapi juga oleh faktor geopolitik dan ekonomi global yang berkembang pada masa itu. Meskipun kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia mengalami penurunan setelah berakhirnya era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berupaya membangun kembali melalui pendekatan yang lebih rasional dan terencana. Dalam amanatnya pada peringatan Hari Penerbangan Nasional tanggal 9 April 1970 (lihat **Lampiran 1**), Soeharto menegaskan pentingnya membangun ketahanan nasional yang kuat dan seimbang dengan menentukan prioritas secara tepat serta menjadikan kekuatan dirgantara sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada periode 1970-1992, pasca peristiwa G30S, Indonesia kesulitan untuk mendapatkan suku cadang dari negara Timur, khususnya Uni Soviet yang membuat beberapa pesawat asal Uni Soviet hanya terpajang di hangarnya. Pada akhirnya pada tahun 1970 Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara barat seperti Australia untuk mendapatkan pesawat tempur dari negara barat seperti pesawat F-86 Sabre. Konsistensi yang sama dalam kebijakan pertahanan Orde Baru juga terlihat pada tahun 1973 ketika mereka membeli T-33 Bird, dan OV-10 Bronco yang kemudian kebijakannya akan diubah ke arah Barat, menggantikan dominasi pasokan militer produk Soviet yang telah mendominasi era-era sebelumnya. Pemerintah Orde Baru mulai melakukan modernisasi pesawat tempur jangka panjang pada tahun dengan membeli F-5 E/F Tiger II, A-4 Skyhawk dari Amerika Serikat, pesawat latih tempur Hawk 53 yang dikembangkan oleh British Aerospace (Inggris), F-16 Fighter Falcon dari Amerika Serikat.³ F-16 merupakan pembelian pesawat terakhir pada masa orde

³ Subdisjarah Dispenau, *Sejarah TNI Angkatan Udara Indonesia (1980-1989)* (5th ed.). (Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Udara, 2008), pp. 70-96.

baru sebelum akhirnya di embargo militer pada tahun 1991 oleh Amerika Serikat akibat peristiwa Santa Cruz.

Setelah peristiwa penembakan Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991, terjadi pemboikotan militer terhadap Indonesia oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya.⁴ Karena hal tersebut, modernisasi berbasis Barat tidak sepenuhnya menghasilkan kemandirian pertahanan. Pesawat tempur modern tidak hanya membutuhkan unit pesawat, tetapi juga dukungan suku cadang, sistem pemeliharaan, pelatihan penerbang, pendidikan teknisi, transfer pengetahuan, dan hubungan diplomatik yang stabil dengan negara pemasok. Ketergantungan tersebut menjadi semakin terlihat ketika kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat dipengaruhi oleh tekanan politik, terutama setelah peristiwa Santa Cruz tahun 1991. Embargo militer yang muncul setelah peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesiapan operasional alutsista udara Indonesia dapat terganggu apabila hubungan politik dengan negara pemasok mengalami ketegangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memandang bahwa kebijakan pengadaan pesawat tempur Angkatan Udara Republik Indonesia pada periode 1970-1992 merupakan persoalan historis yang penting untuk dikaji. Periode ini memperlihatkan dua dinamika utama. Pertama, perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia pasca-1965 memengaruhi arah dan pola pengadaan pesawat tempur dari sistem persenjataan Soviet menuju sistem persenjataan Barat. Kedua, proses modernisasi tersebut membentuk ketergantungan baru terhadap negara-negara maju dalam aspek teknologi, logistik, pelatihan, dan politik pertahanan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas kronologi kedatangan pesawat tempur, tetapi juga menganalisis hubungan antara kebijakan pertahanan, geopolitik, dan struktur ketergantungan dalam modernisasi kekuatan udara Indonesia.

Penelitian terhadap dinamika pengadaan pesawat tempur pada tahun 1970-1992 penting untuk memahami bagaimana kebijakan pertahanan udara Indonesia dibentuk, dijalankan, dan menyesuaikan diri dengan konteks geopolitik global. Penelitian ini berupaya menggambarkan keterkaitan antara kebijakan pertahanan, hubungan internasional, dan faktor politik dalam proses memodernisasi militer Indonesia. Dari

⁴ Matthew Jardine, *East Timor: Genocide in Paradise*. (Tucson: Odonian Press, 1997), p. 15.

perspektif akademik, kajian ini juga memperkaya literatur sejarah militer Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada matra darat.

Kajian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Anissa (2018) yang meneliti pemenuhan kebutuhan *Minimum Essential Force (MEF)* dalam modernisasi alutsista TNI, Wibowo (2024) yang mengkaji kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam penguatan alutsista darat serta Maulana dkk. (2024) yang membahas pengadaan alutsista pada masa 1959-1969. Selain itu, Prastyawan (2017) menyoroti perkembangan industri pesawat terbang nasional dari masa 1966-1998. Namun penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif dan sektoral, belum mengkaji keterkaitan antara kebijakan pengadaan, dinamika geopolitik, dan struktur ketergantungan secara integratif. Di sinilah terdapat celah penelitian yang belum dibahas, yakni ketiadaan kajian historis yang secara komprehensif menelaah proses politik, pertahanan, teknologi, serta pola ketergantungan yang terbentuk dalam pengadaan alutsista udara pada periode tersebut.

Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan pengadaan pesawat tempur Indonesia (1970-1992) merupakan hasil interaksi antara perubahan geopolitik global dan kebutuhan pertahanan nasional yang secara simultan menghasilkan ketergantungan struktural terhadap negara maju. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mampu mengungkap secara historis dan analitis bagaimana orientasi politik luar negeri, dinamika Perang Dingin, serta kebutuhan modernisasi pertahanan udara berinteraksi dalam menentukan arah pengadaan pesawat tempur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian sejarah pertahanan yang berfokus pada dimensi udara dan memberikan pemahaman baru mengenai modernisasi alutsista Indonesia di tengah perubahan konstelasi geopolitik global.

1.2 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1) Pembatasan Masalah

a. Pembatasan Waktu

Penelitian ini dibatasi pada periode 1970-1992, yaitu masa transisi orientasi pertahanan Indonesia dari Blok Timur ke Blok Barat serta fase modernisasi alutsista sebelum embargo militer tahun 1991. Tahun 1970 dipilih karena pada tahun tersebut Indonesia mulai menjalin kerja sama dengan

Australia untuk mendatangkan F-86 Sabre sebagai penanda awal masuknya pesawat tempur dari Blok Barat. Sementara itu, tahun 1992 dijadikan batas akhir karena pada tahun tersebut terjadinya embargo militer dari Amerika Serikat ketika terjadinya peristiwa Santa Cruz.

b. Pembatasan Ruang

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai dinamika pengadaan pesawat tempur dan pesawat latih tempur Angkatan Udara Republik Indonesia. Fokus penelitian meliputi proses pengambilan kebijakan, pertimbangan strategis dan geopolitik, serta munculnya pola ketergantungan teknologi terhadap negara-negara pemasok alutsista. Penelitian ini tidak membahas matra lain maupun perkembangan alutsista di luar ruang lingkup tersebut.

2) Perumusan Masalah

Dari hasil pembatasan yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah dari Dinamika Pengadaan Alutsista Pesawat Tempur Angkatan Udara Republik Indonesia (1970-1992) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perubahan orientasi politik luar negeri memengaruhi arah dan pola pengadaan pesawat tempur Indonesia?
2. Bagaimana pengadaan pesawat tempur berorientasi Barat membentuk ketergantungan Indonesia dalam aspek teknologi, sistem pelatihan, suku cadang dan hubungan diplomatik?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh perubahan orientasi politik luar negeri terhadap kebijakan pengadaan pesawat tempur Indonesia pada periode 1970-1992, menguraikan proses pengambilan keputusannya, serta menganalisis ketergantungan teknologi Indonesia terhadap negara-negara pemasok alutsista udara.

2) Kegunaan

Kegunaan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah militer Indonesia dengan menghadirkan fakta-fakta baru mengenai dinamika pengadaan pesawat tempur Indonesia 1970-1992.

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi rujukan historis bagi TNI Angkatan Udara dalam merumuskan kebijakan pengadaan alutsista, khususnya dalam memahami pola keputusan masa lalu dan menghindari bentuk ketergantungan yang merugikan.

1.4 Kerangka Analisis

Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa pengadaan alutsista pesawat tempur bukanlah keputusan teknis yang netral, melainkan hasil dari interaksi antara perubahan orientasi politik luar negeri, kebutuhan pertahanan, dan struktur kekuasaan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoritis, yaitu Teori Dinamika Persenjataan dan Teori Ketergantungan. Kedua teori ini digunakan secara berurutan dan fungsional. Teori Dinamika Persenjataan dipakai untuk menjelaskan bagaimana perubahan orientasi politik luar negeri memengaruhi arah dan pola pengadaan pesawat tempur Indonesia, sedangkan Teori Ketergantungan digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pengadaan tersebut justru menimbulkan ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara maju dalam aspek politik, ekonomi dan teknologi alutsista udara.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini menggunakan Teori Dinamika Persenjataan sebagaimana dikembangkan oleh Barry Buzan dan Eric Herring buku *The Arms Dynamic in World Politic*. Teori ini menempatkan pengadaan senjata sebagai bagian dari proses politik-strategis yang dipengaruhi oleh perubahan ancaman, pergeseran distribusi kekuatan, dan perkembangan teknologi militer. Dengan demikian, perubahan sumber dan jenis alutsista tidak dipahami sebagai akibat dari pertimbangan teknis belaka, tetapi sebagai respons negara terhadap perubahan lingkungan strategis.⁵ Dalam konteks Indonesia, pergeseran orientasi politik luar negeri dari kedekatan dengan Blok Timur menuju kerja sama yang lebih intensif dengan Blok Barat

⁵ Barry Buzan and Eric Herring, *The Arms Dynamic in World Politics*. (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), p. 9.

berimplikasi langsung pada perubahan arah pengadaan pesawat tempur. Pergeseran tersebut tampak pada perubahan negara pemasok, perubahan jenis pesawat yang dipilih, perubahan mekanisme pengadaan, serta perubahan sistem pendukung seperti pelatihan, logistik, dan pemeliharaan. Melalui teori ini, penelitian berargumen bahwa pengadaan F-86 Sabre, T-33 Bird, OV-10 Bronco, F-5 E/F Tiger II, A-4 Skyhawk, Hawk Mk-53, dan F-16 Fighting Falcon merupakan bentuk *adaptive arms behavior*⁶, yaitu penyesuaian kebijakan pertahanan Indonesia terhadap perubahan geopolitik Perang Dingin dan kebutuhan keamanan nasional.

Secara operasional, Teori Dinamika Persenjataan digunakan untuk membaca empat unsur utama. Pertama, perubahan orientasi politik luar negeri, yaitu pergeseran dari Blok Timur ke Blok Barat pasca-1965. Kedua, perubahan arah pengadaan, yaitu peralihan sumber alutsista dari Uni Soviet ke Amerika Serikat dan sekutunya. Ketiga, perubahan pola pengadaan, yang tampak dalam kombinasi hibah, pembelian, bantuan militer, dan kerja sama pelatihan. Keempat, perubahan fungsi dan karakter pesawat tempur, dari pesawat yang berorientasi pada kebutuhan konflik era Soekarno menuju pesawat yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan Orde Baru. Dengan indikator tersebut, rumusan masalah pertama dijawab dengan menempatkan pengadaan pesawat tempur sebagai cerminan dari perubahan strategi negara, bukan sekadar sebagai rangkaian keputusan pembelian alutsista.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menggunakan Teori Ketergantungan dari Andre Gunder Frank. Dalam bukunya yang berjudul *Capitalism and Underdevelopment in Latin America Historical Studies of Chile and Brazil* teori ini berpijak pada pandangan bahwa hubungan antara negara maju dan negara berkembang bersifat struktural dan timpang atau pola hubungan *metropolis-satellite*⁷. Negara pusat (metropolis) menguasai arus modal, teknologi, pengetahuan, dan mekanisme produksi, sedangkan negara pinggiran (*satellite*) ditempatkan dalam posisi bergantung.⁸ Dalam konteks penelitian ini, teori ketergantungan digunakan untuk menegaskan bahwa modernisasi alutsista udara Indonesia tidak identik dengan kemandirian pertahanan.

⁶ *Adaptive arms behavior* merujuk pada respons suatu negara yang menyesuaikan kuantitas dan kualitas alutsistanya terhadap perubahan lingkungan strategis dan teknologi, sebagai bagian dari spektrum dinamika pengadaan persenjataan yang mendorong negara untuk terus memperbarui militernya.

⁷ Pola ketergantungan negara *metropolis-satellite* adalah struktur ekonomi dan sosial di mana negara-negara maju (metropolis/inti) mendominasi negara-negara berkembang (satelit/pinggiran) melalui eksploitasi sumber daya dan ketergantungan ekonomi.

⁸ Andre Gunder Frank, *Capitalism and underdevelopment in Latin America; Historical studies of Chile and Brazil*. (New York: Monthly Review Press, 1971), p. 15.

Sebaliknya, kebijakan pengadaan pesawat tempur dari negara-negara maju justru menghasilkan keterikatan baru yang bersifat jangka panjang. Indonesia memang memperoleh peningkatan kemampuan tempur, tetapi peningkatan itu dibayar dengan ketergantungan pada suku cadang, dukungan logistik, sistem pelatihan, transfer pengetahuan, modernisasi, *upgrading*⁹, dan bahkan kelangsungan hubungan politik dengan negara pemasok.

Secara operasional, ketergantungan tersebut dianalisis melalui dua dimensi. Pertama, ketergantungan politik, yang tampak dalam pengaruh hubungan diplomatik terhadap akses alutsista, tekanan politik dari negara pemasok, pembatasan kerja sama militer, dan dampak embargo terhadap kesiapan operasional AURI¹⁰. Kedua, ketergantungan teknologi, yang tampak dalam ketergantungan terhadap suku cadang, sistem pemeliharaan, pelatihan teknis, transfer pengetahuan, serta modernisasi pesawat tempur yang tetap memerlukan dukungan kontraktor dan industri pertahanan asing. Dengan demikian, teori ketergantungan digunakan untuk menunjukkan bahwa pengadaan alutsista udara tidak hanya membentuk ketergantungan teknis, tetapi juga menciptakan kerentanan strategis. Negara pemasok tidak hanya menjual pesawat, tetapi juga mempertahankan posisi dominan melalui kontrol atas seluruh ekosistem operasional alutsista tersebut.

Melalui kerangka ini, penelitian berargumen bahwa kebijakan pengadaan pesawat tempur Indonesia pada periode 1970-1992 memiliki dua sisi yang saling bertaut. Di satu sisi, kebijakan tersebut merupakan bentuk adaptasi rasional terhadap perubahan orientasi politik luar negeri dan kebutuhan pertahanan nasional. Di sisi lain, kebijakan yang sama justru menghasilkan ketergantungan struktural terhadap negara-negara maju dalam aspek politik dan teknologi alutsista udara. Dengan kata lain, modernisasi yang ditempuh Indonesia pada periode ini tidak membawa kemandirian penuh, melainkan menempatkan pertahanan udara nasional dalam relasi yang tetap bergantung pada pusat-pusat kekuatan teknologi dan ekonomi global. Oleh karena itu, kedua teori ini dipadukan bukan untuk menjelaskan dua gejala yang terpisah, melainkan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara perubahan orientasi pengadaan dan lahirnya struktur ketergantungan dalam pertahanan udara Indonesia.

⁹ *Upgrading* pesawat tempur adalah proses modernisasi sistem *avionik*, struktur (*airframe*), dan persenjataan pada pesawat tempur tua agar memiliki kemampuan setara pesawat generasi terbaru dan memperpanjang umur pakainya. Proses ini meliputi penggantian komponen, *upgrade* mesin, serta integrasi teknologi radar dan sistem persenjataan canggih (misalnya rudal jarak menengah).

¹⁰ AURI adalah akronim dari Angkatan Udara Republik Indonesia.

1.5 Metode dan Bahan Sumber

1) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis, meliputi tahapan pemilihan topik, pengumpulan sumber-sumber/heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi.¹¹ Melalui metode ini, peneliti berupaya merekonstruksi secara sistematis kebijakan dan dinamika pengadaan pesawat tempur Indonesia dalam konteks kebijakan pertahanan udara masa Orde Baru. Analisis dilakukan menggunakan dua teori utama, yaitu Teori Dinamika Persenjataan dan Teori Ketergantungan. Teori Dinamika Persenjataan menjelaskan bahwa perubahan dan pengadaan alutsista merupakan hasil interaksi antara pengembangan teknologi, persepsi ancaman, serta proses politik dan strategis yang mendorong negara untuk terus menyesuaikan kapabilitas militernya dalam lingkungan internasional yang kompetitif. Sedangkan Teori Ketergantungan menjelaskan bahwa keterbelakangan negara berkembang bukan disebabkan faktor internal, tetapi lahir dari hubungan struktural yang timpang antara negara pusat dan pinggiran, di mana pembangunan pusat justru menciptakan ketergantungan ekonomi, teknologi, dan politik di kawasan pinggiran. Pengaplikasian kedua teori tersebut dalam penelitian ini adalah Teori Dinamika Persenjataan menganalisis bagaimana negara-negara mengembangkan, mengakuisisi, dan mendistribusikan sistem persenjataan mereka sebagai bentuk respons terhadap lingkungan strategis, tekanan politik, kebutuhan keamanan nasional, serta perkembangan teknologi. Sementara itu, Teori Ketergantungan digunakan untuk menafsirkan bagaimana orientasi pengadaan alutsista dari negara-negara Barat menimbulkan ketergantungan teknologi dan politik yang berdampak ketika embargo militer diberlakukan menjelang akhir Orde Baru.

Selanjutnya pada tahap mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai tempat utama seperti Pusat Sejarah TNI yang menaungi Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan TNI, sebagai tempat yang menyediakan arsip internal, serta publikasi resmi terkait pengadaan pesawat tempur. Seperti arsip Surat Instruksi MENHANKAM/PANGAB (Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI)

¹¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), pp. 70-80

pada rentang tahun 1970an sampai 1990an, Pidato Presiden Soeharto ketika peringatan Hari Penerbangan Nasional pada tanggal 9 April 1970, dan juga publikasi resmi berbentuk foto dan buku. Selain itu juga saya membaca buku-buku yang dikeluarkan oleh Dinas Penerangan TNI AU antara lain yaitu *Sejarah TNI Angkatan Udara Indonesia* edisi 1 sampai 5. Beberapa buku serupa dikeluarkan oleh Dinas Penerangan TNI AU seperti *BAKTITNI Angkatan Udara 1946-2004* dan *Perjalanan TNI Angkatan Udara dan pengembangannya pada awal dasawarsa 80an*. Peneliti juga pergi ke tempat utama lain untuk mengumpulkan sumber-sumber dengan pergi ke Dinas Sejarah TNI Angkatan udara yang terletak di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur. Di sana saya mengumpulkan sumber-sumber primer seperti arsip Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Peneliti juga menelusuri buku-buku yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), seperti buku *Perkembangan TNI Angkatan Udara Iswahjudi Madiun*. Selain itu, peneliti memanfaatkan sumber-sumber digital dan literatur akademik yang tersedia melalui internet, termasuk jurnal dan buku mengenai perkembangan kekuatan udara Indonesia seperti *Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008* dan *Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku tentang dinamika persenjataan seperti buku *The Arms Dynamic in World Politic* karya Buzan dan Herring dan buku tentang ketergantungan seperti buku karya Andre Gunder Frank yang berjudul *Capitalism and Underdevelopment in Latin America Historical Studies of Chile and Brazil*, serta sumber-sumber lainnya yang terdapat di daftar pustaka. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk merekonstruksi secara kronologis kedatangan pesawat-pesawat tempur pada tahun 1970-1992, serta menganalisis kebijakan pada era tersebut dan dampaknya.

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahap verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber dilakukan melalui dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk memastikan keaslian dan kedudukan sumber, terutama dengan melihat asal dokumen, lembaga penerbit, tahun penerbitan, serta keterkaitannya dengan institusi yang berwenang dalam bidang pertahanan. Dokumen seperti Keputusan MENHANKAM/PANGAB, Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, amanat Presiden Soeharto, serta publikasi resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara diperlakukan sebagai sumber penting

karena berasal dari lembaga yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan sejarah kelembagaan TNI Angkatan Udara.

Kritik intern dilakukan dengan membandingkan isi antar sumber untuk melihat konsistensi data, terutama mengenai tahun pengadaan, jenis pesawat, jumlah pesawat, negara asal, satuan pengguna, serta konteks kebijakan yang melatarbelakanginya. Misalnya, data mengenai kedatangan F-86 Sabre tidak hanya dilihat dari buku sejarah TNI Angkatan Udara, tetapi juga dibandingkan dengan dokumen kebijakan bantuan militer Australia tahun 1972-1974. Perbandingan ini penting karena sumber naratif AURI menjelaskan konteks kedatangan dan penggunaan pesawat, sedangkan dokumen kebijakan menunjukkan kerangka administratif, anggaran, serta bentuk bantuan yang diberikan. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya menerima informasi sebagai fakta tunggal, tetapi menempatkannya dalam hubungan antara narasi sejarah dan dokumen kebijakan.

Contoh lain dilakukan pada pengadaan pesawat T-33 Bird, OV-10 Bronco, F-5 E/F Tiger II, A-4 Skyhawk, Hawk Mk-53, dan F-16 Fighting Falcon. Data mengenai pesawat-pesawat tersebut diperiksa dengan mencocokkan keterangan dalam publikasi resmi TNI AU, daftar pengadaan, dan sumber sekunder yang membahas modernisasi alutsista udara. Apabila terdapat perbedaan penekanan antar sumber, misalnya satu sumber lebih menekankan aspek kedatangan pesawat, sementara sumber lain menekankan fungsi operasional atau pelatihan personel, peneliti tidak langsung menganggapnya sebagai pertentangan. Perbedaan tersebut dibaca sebagai perbedaan sudut pandang sumber. Oleh karena itu, peneliti menyusun data dengan melihat kesesuaian konteks, kedekatan sumber dengan peristiwa, serta fungsi sumber dalam menjelaskan kebijakan pengadaan.

Dalam proses kritik sumber, peneliti juga memperhatikan penggunaan istilah AURI dan TNI AU. Istilah AURI dipertahankan karena telah digunakan secara konsisten sejak awal pembahasan serta dinilai lebih sesuai dengan konteks historis penelitian. Meskipun terdapat perubahan nomenklatur, AURI dan TNI AU pada dasarnya merujuk pada satu kesatuan institusi Angkatan Udara Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan istilah AURI tidak mengubah makna substantif pembahasan, melainkan bertujuan menjaga konsistensi penulisan, menyelaraskan penggunaan istilah, dan memudahkan pembaca memahami kesinambungan kelembagaan dalam periode yang dikaji. Dengan demikian, kritik sumber dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan untuk memeriksa keaslian dokumen, tetapi juga

untuk menyaring, membandingkan, dan menafsirkan data agar sesuai dengan konteks sejarah yang sedang dikaji.

Melalui proses tersebut, sumber yang digunakan dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai data yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bahan yang harus diuji dan dikaitkan dengan sumber lain. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa rekonstruksi mengenai pengadaan pesawat tempur Indonesia periode 1970-1992 tidak hanya berdasarkan satu sumber, tetapi dibangun melalui perbandingan antara arsip kebijakan, publikasi resmi militer, data anggaran, dan literatur akademik. Dengan cara ini, penelitian dapat menghasilkan narasi sejarah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Setelah sumber tervalidasi, peneliti menafsirkan data dengan melihat konteks strategi pemerintah untuk menyesuaikan kemampuan udara dan hubungan internasional pada masa itu. Interpretasi dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan terlebih dahulu menggambarkan secara faktual peristiwa dan kebijakan pengadaan pesawat tempur, kemudian menganalisis makna, pola, serta implikasinya terhadap kebijakan pertahanan nasional. Analisis didasarkan teori dinamika persenjataan dan teori ketergantungan untuk memahami bagaimana proses pengambilan keputusan dan adaptasi kebijakan pertahanan berlangsung dalam merespons perubahan geopolitik dan kebutuhan keamanan nasional, serta menjelaskan mengapa proses tersebut membentuk struktur ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan ekonomi dan politik global.

Tahap terakhir adalah menyusun seluruh temuan menjadi narasi sejarah yang runtut. Pada bagian ini peneliti menggambarkan perjalanan modernisasi Angkatan Udara Republik Indonesia mulai dari masa transisi pasca G30s, kedatangan T-33 dan F-86, modernisasi lewat F-5 dan A-4, pembelian F-16 menjelang 1990 hingga embargo militer yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

2) Sumber Penelitian

a. Sumber primer

Sumber primer berasal dari dokumen TNI AU yang memuat data pengadaan pesawat tempur, laporan inventaris, serta dokumen internal terkait kebijakan pertahanan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder meliputi buku-buku sejarah militer dan pertahanan, jurnal tentang kebijakan pertahanan era Orde Baru. Buku-buku tentang hubungan internasional, dinamika persenjataan, dan tentang ketergantungan yang menjadi dasar dalam menafsirkan hubungan antara kebijakan alutsista dan struktur geopolitik global.

